

RENCANA KERJA TAHUNAN 2025



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

JALAN ADE IRMA NASUTION, SUNGAI PANTERAN,
PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan terselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3.1. Maksud	4
1.3.2. Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	7
2.1.1 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu	8
2.1.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.3.1. Isu Aktual	11
2.3.2. Permasalahan dan hambatan	16
2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan	

Prioritas Pembangunan Nasional.....	21
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	21
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024	24
BAB V PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan..... 26

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 34

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan..... 35

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan 47

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program & Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategi merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan Strategi memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan rencana kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan memuat kebijakan, program, dan kegiatan berjalan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, serta menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rencana kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) atau pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Hal tersebut merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Pancasila dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia No.4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renacana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menyusun suatu rencana pembangunan di bidang pengawasan serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Analisa dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun Lalu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) program, yang diimplementasikan dalam 61 (enam puluh satu) kegiatan sebagaimana tergambar dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.1
Persentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	Capaian Kinerja Setelah dikonversi
Meningkatnya manajemen kinerja yang baik	Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP kategori "A"	50%	34,15%	68,29 %
	Persentase Kabupaten/Kota dengan nilai SAKIP kategori B ke atas	37%	-	-
Meningkatnya pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	Indeks Integritas Daerah	69	69,93	101,35 %
	Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	1 Perangkat Daerah	0	0
Meningkatnya kepatuhan terhadap	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	86 %	87,36 %	101,58 %

pengelolaan keuangan daerah				
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	68 %	70,40 %	116,76 %
Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik	Level Maturitas SPIP	3	3	100 %
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Skor Kapabilitas APIP	3	3	100 %

Catatan : $(5) = ((4)/(3)) * 100$

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terdapat 5 (lima) sasaran dengan interpretasi nilai Berhasil, secara keseluruhan pencapaian kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja sebesar **75,92 %**.

2.1.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Secara lengkap capaian kinerja kegiatan, program dan Sasaran yang di atas dapat dijelaskan pada **tabel 2.2** terlampir.

Aspek Keuangan

Dalam mencapai Sasaran pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didukung dengan alokasi dana yang berasal dari alokasi dana APBD.

Tabel 2.3 REALISASI FISIK & KEUANGAN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2		3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		26.170.458.009	23.458.576.704	89,63
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000000	40.298.150	80,61
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	80,60
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.433.696.851	18.947.575.948	92,7
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.423.798.851	18.947.575.948	92,75
	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	651.578.000	636.939.000	85,36
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	358.320.000	358.140.000	99,95
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	13.520.000	75,11
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	13.520.000	72,33
	iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.974.592.000	1,383,471,061	78,56
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 9 Tugas dan Fungsi	1.596.713.758	1.259.183.206	78,86
	7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	366.544,000	160.789.400	43,87
	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.592.000	1.781.533.681	90,22
	8	Penyediaan Komponen Instalasi	70.550.000	70.548.873	100

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	179.829.695	99,50
	10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	79.999.130	99,96
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	145.750.910	97,17
	12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	23.527.501	67,51
	13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.259.042.000	1.082.677.572	85,99
	14	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	199.100.000	100
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	235.911.400	150.810.100	63,93
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.911.400	150.810.000	69,93
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.000.000	718.188.600	76,88
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.00.000	100
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	435.000.000	393.000.000	76,88
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.000.000	393.000.000	90,34
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.000.000	386.677.717	60,41
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	500.000.000	386.677.717	77,33

		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140,000,000	0	0
	21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		5.423.016.000	4.084.083.199	75.31
	xi	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.319.185.000	2.377.147.881	71,62
	22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	834.479.000	432.247.126	71,62
	23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	969.496.000	810.173.800	83,56
	24	Reviu Laporan Kinerja	142.00.000	82.230.400	57,91
	25	Reviu Laporan Keuangan	190.000.000	142.077.200	74,7
	26	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	750.000.000	503.829.855	67,7
	27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	433.210.000	406.589.500	90,3
	x	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.103.831.000	1.593.755.000	75,75
	28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	150.000.000	113.170.000	75,4
	29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.953.831.000	1,593.765.318	98,82
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.574.445.600	1.126.359.008	71,54
	xi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	95,000,000	88,852,200	93.53

	30	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	126.180.000	55.489.000	43,9
	32	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	126.180.000	55.489.100	43,9
	xii	Pendampingan dan Asistensi	1.448.265.000	1.070.869.908	90,86
	33	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	469.190.000	286.477.044	61
	33	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	465.455.000	413.293.490	80
	34	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	272.905.600	220.005.078	80
	35	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	240.716.000	151.094.296	62
		Jumlah : 35 kegiatan	33.167.919.609	28.699.018.911	86,4

Dari tabel di atas tergambar bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 memperoleh anggaran dari APBD dengan belanja langsung sebesar 33.167.919.609,-dengan capaian realisasi keuangan 86,4 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan untuk membantu Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi : koordinasi, pemberian pedoman dan stándar, pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melalui :

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Monitoring dan evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa LPPD disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan Indikator Kinerja dan Wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel tertuang pada

Lampiran I.I pada Aspek Pengambil Kebijakan yang berbunyi Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut tercantum didalam Sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2023-2026 yang berbunyi Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Indikator Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di tindak lanjuti pada BPK, Irjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis dan Inspektorat Provinsi.

Secara lengkap pencapaian kinerja pelayanan OPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di atas dapat dijelaskan pada **tabel 2.4** terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat

Daerah

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan dapat mencapai tujuannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan efektivitas tata kelola (*governance*), manajemen resiko (*risk management*) dan pengendalian (*control*).

Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang pengawasan yaitu sebagai pengendali internal manajemen harus dapat mengisi peran dengan memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang, yaitu pemerintah pusat mengawasi dan membina provinsi dan selanjutnya

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2.3.1 Isu Aktual

Adapun isu aktual pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang didalam Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.
2. Mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP)
3. Mendorong peningkatan maturitas system pengendalian intern pemerintah (SPIP).
4. Mendorong kolaborasi antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan APIP dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
5. Upaya deteksi dini dengan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
6. Mendorong peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

7. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksa BPK
8. Mendorong capaian program pemberantasan korupsi terintegrasi.
9. Meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan

Pelaksanaan pengawasan khususnya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berperan sebagai peluang dan kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses pencapaian target tersebut terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana maupun Keuangan, yaitu :

- 1) Kompetensi SDM yang belum memadai terutama bidang Teknologi Informasi dan Komputer. Hal ini terkait terhadap pelaksanaan tugas-tugas khusus yang menyangkut permasalahan tersebut yang banyak dan harus diselesaikan dengan cepat.
- 2) Banyaknya temuan-temuan BPK, Inspektorat Daerah Provinsi, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian terkait yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan.
- 3) Keberadaan sarana dan prasarana yaitu mobil diantaranya sudah mencapai usia lebih dari 10 tahun serta sarana yang juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan audit yaitu

alat-alat ukur masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengawasan, terutama peninjauan ke lokasi pemeriksaan di pedesaan (ke luar kota) masih sangat tergantung pada pihak auditan dan belum optimal.

Masalah tersebut merupakan hal pokok yang dapat mempengaruhi percepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran-sasaran Pemerintah Provinsi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fokus pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau Rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit

untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau
 - b. Pemeriksaan Kinerja
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD
- a) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah :
 - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah
 - Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
 - Rancangan Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
 - Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - b) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah
 - Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
 - Pengelolaan pembiayaan daerah
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan
 - Pengelolaan barang milik daerah
 - c) Reviu Laporan Keuangan
 - d) Kegiatan Pengawasan Lainnya
 - Probit audit
 - Laporan Kinerja (reviu)
 - Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (reviu)
 - Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)

- perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender
(*responsive gender*) (*evaluasi*).
 - Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
 - a) Pengendalian Gratifikasi
 - b) Pelaksanaan survey penilaian integritas
 - c) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
 - d) Asistensi pembangunan reformasi dan birokrasi
 - e) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi
 - f) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi
 - g) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
 - h) Pemeriksaan investigatif
 - i) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang indikasi korupsi
 - j) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
 4. Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3
 - b) Maturitas system pengendalian internal pemerintah
 - c) Penerapan manajemen resiko
 - d) Pendidikan professional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 43.867.215.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Secara lengkap Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel dapat dijelaskan pada **tabel 2.5** terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat. Secara lengkap dapat dijelaskan pada **tabel 2.6** terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penajaman Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi, yaitu :

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi (urusan wajib dan urusan pilihan).
- 2) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan ruang lingkup ;
 - 1) Pendampingan/asistensi.
 - 2) Sistem deteksi dini (early warning system) melalui pemantauan atau fasilitasi implementasi hasil evaluasi RAPBD.
 - 3) Koordinasi dan sinergitas, terhadap Rakorwasnas dan Rakorwasda, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi Sasaran Kebijakan dan program Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
1.Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.	Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.	Program Penyelenggaraan Pengawasan

2. Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik.	Evaluasi Penerapan pengembangan SPIP oleh OPD pada level berkembang	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi.
3. Terwujudnya Penegakan Integritas	Pembinaan dan pengawasan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.	Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	Evaluasi Penerapan pengembangan SPIP oleh SKPD pada level berkembang	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program dan kegiatan yang akan diselenggarakan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan
2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara lengkap Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada **tabel 4.1** terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2025 masih dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui *desk* renja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, selain itu sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk tindak lanjut program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Sumatera Selatan Tahun 2025 yang memuat Indikator maupun penjabaran pagu anggaran secara rinci.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Kepmen 50 Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/(2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1)/2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)/Sub Kegiatan			Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) / (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/(2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) / 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%							100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	5 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	2 laporan	3 Laporan	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	1470 OB				100	-	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	312 OB	156 OB	312 OB	300 OB	96,15	1470 OB	1366 OB	100
	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				100	325 OB	325 OB	100

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan dan Verifikator yang dibayar	228 OB	96 OB	228 OB	228 OB	100	240 OB	240 OB	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	24 OB	-	24 OB	12 OB	50	24 OB	24 OB	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	220 stel	200 stel	220 stel	220 stel	100	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS/APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47 orang	31 orang	47 Orang	46 Orang	97,87	47 Orang	40 Orang	62,91
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS/APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		18 OK	36 OK	-	100	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS/APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		5 OK	20 OK	-	0	73 Orang	60 Orang	82,19
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	3 kali	2 kali	3 Kali	3 Kali	100	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan		-	-	-	-	2 Paket	2 Paket	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit komponen instalasi penerangan kantor yang tersedia	10 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	2 Paket	2 Paket	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	40 jenis	60 jenis	60 Jenis	100	-	-	-
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang tersedia	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	-	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang tersedia	30 jenis	30 Jenis	30 jenis	30 jenis	100	4 Paket	4 Paket	100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	2160 eks	1742 eks	2160 eks	2160 eks	100	21 Dokumen	17 Dokumen	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi	96 laporan	413 OrangKali	150 kali	-	0	87 Laporan	75 Laporan	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat dan koordinasi		53 Laporan	96 Laporan	96 laporan	100	-	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website dan Media Sosial yang dikelola	3 laporan	-	-	4 web	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang tersedia	1 unit	R2 = 1; R4 = 2	1 unit	1 unit	100	6 Unit	6 Unit	100
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia		-	-	-	100	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur yang tersedia	4 jenis	8 Jenis	14 jenis	1 jenis	100	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor lainnya	6 jenis	-	-	-	100	6 Unit	6 Unit	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/materai yang teredia	1000 materai	748 materai/benda pos	1000 materai/benda pos	600 materai/benda pos	100			100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	48 rekening	44 Rekening	60 Rekening	60 Rekening	100	12 Laporan	12 Laporan	100
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	33 jasa	1 paket	33 jasa	33 jasa	100	12 Laporan	12 Laporan	100
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia		1 paket	-	-	100	-	-	-
Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia		1 Rumah	-	-	100	-	-	-

Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia		-	-	-	100	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	17 kendaraan	14 Kendaraan	17 Kendaraan	16 kendaraan	100	17 Kendaraan	17 Kendaraan	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	-	-	-	100	-	-	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang dipelihara	3 jenis	6 Jenis	3 jenis	3 jenis	100	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		-	4 jenis	4 jenis	100	90 Unit	0	0
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	1 Gedung	1 unit	1 unit	100	1 Unit	0	0
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	90%				100	-	-	-
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	70 laporan	125 LHP	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah		2 Laporan	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah		15 Laporan	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah		50 Laporan	70 LHP	70 LHP	100	115 Laporan	70 Laporan	60,86
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		-	-	-	-	83 Laporan	81 Laporan	97,59
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		-	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		1 laporan	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		1 Laporan	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah		8 laporan	70 LHP	70 LHP	100	-	-	-
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja PemProv Sumsel	2 laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 Laporan	100
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu atas Laporan Keuangan PemProv Sumsel	1 laporan	1 LHR	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 laporan	100
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	-	-	45 Laporan	45 Laporan	100	-	-	-

Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota		17 LHE	-	-	-		-	-
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota		13 Laporan	-	-	-	50 Laporan	47 Laporan	94
Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah laporan monev TLHP BPK RI dan APIP	5 dokumen	2 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	85 laporan	20 Laporan	85 laporan	80 laporan	100	85 Dokumen	84 Dokumen	100
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu		4 Laporan	-	-	100	-	-	-
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	-	-	30 Laporan	30 Laporan	100	17 Laporan	14 laporan	82,35
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	90%				-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis bidang pengawasan	3 dokumen	2 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100
Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	1 Laporan	1 Laporan	30 laporan	23 laporan	76,67	39 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	82,05
Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi penilaian reformasi birokrasi	3 Perangkat daerah	3 Perangkat daerah	40 Laporan	40 Laporan	100	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	100

Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi penilaian reformasi birokrasi	1 Laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Laporan	12 Laporan	-	-	100	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 laporan	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 laporan	-	-	100	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 laporan	-	-	100	-	-	-

Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1 laporan	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		3 laporan	-	-	-	-	-	-
Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi terkait Penegakan Integritas		2 OPD	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	80
Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan pendampingan, asistensi dan verifikasi terkait Penegakan Integritas		1 laporan	-	-	-	-	-	-

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197506171995011001

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI 2024	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	Rasio Jumlah temuan/saran hasil pengawasan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	73 %	67,50%	68%	79,40%	80%	72,50%	70,12%	77,09%	79,40%	80%	

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197506171995011001

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEGIATAN					Catatan Penting
	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	5	3	4	5		7	8	9	10	11	12
	Inspektorat Daerah						43.867.215.800	Inspektorat Daerah				43.867.215.800	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Kota Palembang	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	33.801.582.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	33.801.582.000	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Kota Palembang	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	90%	300.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	90%	300.000.000	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSE L	4 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSE L	4 Dokumen	50.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD			Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD			Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD			Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD			Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSE L	6 dokumen	50.000.000

6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palembang	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Palembang	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	SUMSEL	90%	24.502.930.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	SUMSEL	90%	24.502.930.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palembang	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	23.320.000.000,0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	23.320.000.000,0
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	822.210.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	822.210.000
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palembang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000
4	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000

				Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana	Kota Palembang	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	SUMSE L	90%	24.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	SUMSE L	90%	24.000.000
1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palembang	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSE L	12 Laporan	24.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSE L	12 Laporan	24.000.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	Luar dan Dalam Kota	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	SUMSE L	90%	2.483.674.300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	SUMSE L	90%	2.483.674.300
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palembang	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSE L	115	230.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSE L	-	230.000.000
2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Luar dan Dalam Kota	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	LUAR DAN DALAM PROVINSI	88 orang	1.887.130.300	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	LUAR DAN DALAM PROVINSI	88 orang	1.887.130.300
3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kota Palembang	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	SUMSE L	45 orang	366.544.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi	SUMSE L	45 orang	366.544.000

		Perundang-Undangan		perundang undangan					perundang undangan			
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	Kota Palembang	Persentase administrasi umum yang tercapai	SUMSE L	90%	2.229.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	SUMSE L	90%	2.229.000.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSE L	3 paket	90.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSE L	3 paket	90.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSE L	4 paket	220.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSE L	4 paket	220.000.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSE L	3 paket	90.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSE L	3 paket	90.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSE L	4 paket	220.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSE L	4 paket	220.000.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSE L	21 dokumen	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSE L	21 dokumen	35.000.000

6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar dan Dalam Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUAR DAN DALAM PROVINSI	96 laporan	1.374.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUAR DAN DALAM PROVINSI	96 laporan	1.374.000.000
7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palembang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	200.000.000
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	Kota Palembang	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	SUMSEL	95%	1.585.845.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	SUMSEL	95%	1.585.845.300
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUMSEL	R4 = 1 unit	628.160.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUMSEL	R4 = 1 unit	628.160.000
2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	340.911.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	340.911.000
3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	11 unit	616.774.300	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	11 unit	616.774.300

VI I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	Kota Palembang	Persentase jasa penunjang yang tersedia	SUMSE L	90%	1.207.980.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	SUMSE L	90%	1.207.980.000
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palembang	Jumlah benda pos/materai yang tersedia	SUMSE L	1452 materai/ benda pos	14.520.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos/materai yang tersedia	SUMSE L	1452 materai/ benda pos	14.520.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SUMSE L	12 Laporan	598.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	SUMSE L	12 Laporan	598.960.000
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palembang	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	SUMSE L	12 Laporan	594.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	SUMSE L	12 Laporan	594.500.000
VI II	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	Kota Palembang	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	SUMSE L	90%	1.468.152.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	SUMSE L	90%	1.468.152.400
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Palembang	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	SUMSE L	20 unit	527.272.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	SUMSE L	20 Unit	527.272.400

2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Palembang	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	SUMSE L	3 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara	SUMSE L	3 jenis	70.000.000
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Palembang	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	SUMSE L	50 unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	SUMSE L	50 Unit	150.000.000
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palembang	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	SUMSE L	1 unit	570.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	SUMSE L	1 unit	570.000.000
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	Luar dan Dalam Kota	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	SUMSE L	85%	7.856.229.800	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	SUMSE L	85%	7.856.229.800
I	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	Luar dan Dalam Kota	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	SUMSE L	85%	4.968.960.800	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	SUMSE L	85%	4.968.960.800
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palembang	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSE L	100 Laporan hasil pengawasan	1.292.421.000	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSE L	100 Laporan hasil pengawasan	1.292.421.000
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Luar dan Dalam Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSE L	100 Laporan hasil pengawasan	1.223.838.000	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSE L	100 Laporan hasil pengawasan	1.223.838.000

3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	Kota Palembang	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSE L	2 LHR	200.378.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSE L	2 LHR	200.378.000
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	Kota Palembang	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSE L	1 LHR	280.670.000	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSE L	1 LHR	280.670.000
5	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	Luar dan Dalam Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	17 Kab/Kota	45 laporan	1.349.878.800	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	17 Kab/Kota	45 laporan	1.349.878.800
6	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Palembang	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	17 Kab/Kota	6 dokumen	621.775.000	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	17 Kab/Kota	6 dokumen	621.775.000
II	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Palembang	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SUMSE L	85%	2.887.269.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SUMSE L	85%	2.887.269.000
1	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangan	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSE L	22 Laporan	385.000.000	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSE L	22 Laporan	385.000.000
1	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam dan Luar Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSE L	135 laporan	2.502.269.000	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSE L	135 Laporan	2.502.269.000

C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendmpingan dan asistensi yang dilaksanakan	Kota Palembang	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	SUMSE L	85%	2.299.404.000	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	SUMSE L	85%	2.299.404.000
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan hasil perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Kota Palembang	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	SUMSE L	85%	418.099.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	SUMSE L	85%	418.099.000
1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Kota Palembang	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSE L	3 Rekomendasi	418.099.000	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSE L	3 Rekomendasi	418.099.000
II	Pendampingan dan asistensi	Jumlah laporan pendampingan/asistensi	Kota Palembang	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	SUMSE L	80%	1.881.305.000	Pendampingan dan asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	SUMSE L	80%	1.881.305.000
1	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palembang	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSE L	41 Perangkat Daerah	490.341.500	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSE L	41 Perangkat Daerah	490.341.500

2	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Palembang	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSE L	41 Perangkat Daerah	608.261.500	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSE L	41 Perangkat Daerah	608.261.500
3	Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Palembang	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SUMSE L	4 Kegiatan	358.578.000	Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	SUMSE L	4 Kegiatan	358.578.000
4	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Palembang	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	SUMSE L	4 Perangkat Daerah	424.124.000	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	SUMSE L	4 Perangkat Daerah	424.124.000
	Jumlah						43.867.215.800	Jumlah				43.957.215.800

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197506171995011001

TABEL 2.6

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197506171995011001

TABEL 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			12	13
	6.01	Inspektorat Daerah				43.867.215.800			100	#####		PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
A	6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	SUMSEL	100%	33.711.582.000	PAD		100	#####	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

I	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SUMSEL	3 laporan	300.000.000	PAD		3 Laporan	300.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	SUMSEL	4 Dokumen	50.000.000	PAD		4 Dokumen	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	50.000.000	PAD		6 dokumen	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	50.000.000	PAD		6 dokumen	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	50.000.000	PAD		6 dokumen	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	SUMSEL	6 dokumen	50.000.000	PAD		6 dokumen	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

6	6.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	SUMSEL	4 laporan	50.000.000	PAD		4 laporan	50.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	SUMSEL	95%	24.562.930.000	PAD		95%	#####	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan	SUMSEL	1554 OB	23.320.000.000	DAU		1554 OB	#####	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUMSEL	12 Dokumen	822.210.000	PAD		12 Dokumen	822.210.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	SUMSEL	12 Dokumen	360.720.000	PAD		12 Dokumen	360.720.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	6.01.01.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUMSEL	1 Laporan	60.000.000	PAD		1 Laporan	60.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

III	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	SUMSEL	95%	24.000.000	PAD		95%	24.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	SUMSEL	12 Laporan	24.000.000	PAD		12 Laporan	24.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
IV	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	SUMSEL	90%	2.483.674.300	PAD		90%	2.483.343.330	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	SUMSEL	115 paket	230.000.000	PAD		115 paket		KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	LUAR DAN DALAM PROVINSI	88 orang	1.887.130.300	PAD		88 orang	2.075.843.330	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	SUMSEL	45 orang	366.544.000	PAD		45 orang	407.500.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
V	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	SUMSEL	90%	2.229.000.000	PAD		90%	2.329.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem

											pemerintah daerah	Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	90.000.000	PAD		3 paket	90.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	PAD		4 paket	220.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	SUMSEL	3 paket	90.000.000	PAD		3 paket	90.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	6.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	SUMSEL	4 paket	220.000.000	PAD		4 paket	220.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	6.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	SUMSEL	30 Dokumen	35.000.000	PAD		30 Dokumen	35.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
6	6.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LUAR DAN DALAM PROVINSI	96 laporan	1.374.000.000	PAD		96 laporan	1.474.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

7	6.01.01.1.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUMSEL	2 dokumen	200.000.000	PAD		2 dokumen	200.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VI	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	SUMSEL	95%	1.585.845.300	PAD		95%	1.167.685.300	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	SUMSEL	R4 = 1 unit	628.160.000	PAD		R4 = 1 unit	-	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	SUMSEL	3 paket	340.911.000	PAD		3 paket	390.911.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUMSEL	11 unit	616.774.300	PAD		11 unit	776.774.300	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VII	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	SUMSEL	90%	1.207.980.000	PAD		90%	1.257.980.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

1	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	SUMSEL	12 laporan	14.520.000	PAD		12 laporan	14.520.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUMSEL	12 laporan	598.960.000	PAD		12 laporan	648.960.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	SUMSEL	12 Laporan	594.500.000	PAD		12 Laporan	594.500.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
VIII	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	SUMSEL	90%	1.318.152.400	PAD		90%	1.368.152.400	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	SUMSEL	20 Unit	527.272.400	PAD		20 Unit	577.272.400	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	SUMSEL	3 Unit	70.000.000	PAD		3 Unit	70.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SUMSEL	50 Unit	150.000.000	PAD		50 Unit	150.000.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem

											pemerintah daerah	Akuntabilitas Kinerja
4	6.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SUMSEL	1 unit	570.880.000	PAD		1 unit	570.880.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
B	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	SUMSEL	85%	7.856.229.800	PAD		85%	8.144.956.700	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
I	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	SUMSEL	85%	4.968.960.800	PAD		85%	4.968.960.800	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	SUMSEL	100 Laporan	1.292.421.000	PAD		100 Laporan	1.257.421.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	SUMSEL	100 Laporan	1.223.838.000	PAD		100 Laporan	1.223.838.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	SUMSEL	2 Laporan	200.378.000	PAD		2 Laporan	200.378.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

4	6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	SUMSEL	1 Laporan	280.670.000	PAD		1 Laporan	280.670.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	6.01.02.1.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	17 Kab/Kota	45 laporan	1.349.878.800	PAD		45 laporan	#####	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
6	6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	17 Kab/Kota	6 dokumen	621.775.000	PAD		6 dokumen	621.775.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	SUMSEL	100 laporan	2.887.269.000	PAD		100 laporan	3.175.995.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	SUMSEL	22 Laporan	385.000.000	PAD		22 Laporan	423.500.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	SUMSEL	135 laporan	2.502.269.000	PAD		135 laporan	2.752.495.900	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

C	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	SUMSEL	90%	2.299.404.000	PAD		90%	2.529.341.900	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
I	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	SUMSEL	90%	418.099.000	PAD		90%	459.908.900	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	SUMSEL	3 Rekomendasi	418.099.000	PAD		3 Rekomendasi	459.908.900	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	6.01.03.1.02	Pendampingan dan asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	SUMSEL	6 laporan	1.881.305.000	PAD		6 laporan	2.069.433.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
1	6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	SUMSEL	39 Perangkat Daerah	490.341.500	PAD		39 Perangkat Daerah	539.375.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
2	6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	SUMSEL	41 Perangkat Daerah	608.261.500	PAD		41 Perangkat Daerah	669.087.000	KPD : 4.6.2 Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	KPN 7.3.4 : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001